

Urgensi Mata Kuliah Pengembangan dan Praktik Pembelajaran PPKn pada Calon Guru Sekolah Dasar

Lisa Retnasari^{1*}, Suyitno², Dikdik Baehaqi Arif³, Suroto⁴

^{1,2,4} Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan

³ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan

*lisa.retnasari@pgsd.uad.ac.id

ABSTRACT

As prospective elementary school educators, Elementary School Teacher Education (PGSD) students need to equip themselves with comprehensive mastery of teaching materials. This article aims to identify and analyze understanding of the basic concepts of Civics through the Elementary School Education and Learning (P3PPKn) course. The research method used is descriptive qualitative with fourth semester PGSD student as respondents. Data collection techniques are carried out through: observation, interviews and documentation. Data analysis technique use data triangulation. The results of the study revealed that PGSD students had a good level of understanding of the basic concepts of Elementary Civic Education. The basic concepts of Pancasila and Civics Education materials such as: Pancasila, Unity in Diversity, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia must become the main knowledge of prospective educators at the elementary level. The P3PPKn course requires students not only to understand the concept of material, but how to teach it through the learning designs that have been prepared. Therefore the quality of P3PPKn courses needs to be improved in preparing professional educators according to the challenges of the times.

Keywords: civic education, P3PPKn, elementary school, moral, character

ABSTRAK

Sebagai calon seorang pendidik sekolah dasar, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) perlu membekali diri menguasai materi ajar secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman konsep dasar PPKn melalui mata kuliah P3PPKn SD. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan responden mahasiswa PGSD semester IV. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian memperlihatkan mahasiswa PGSD memiliki tingkat pemahaman konsep dasar PPKn SD yang baik. Konsep dasar materi PPKn seperti: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD NRI 1945 dan NKRI harus menjadi pengetahuan utama calon pendidik di tingkat SD. Mata kuliah P3PPKn menuntut siswa tidak hanya paham mengenai konsep materi, akan tetapi bagaimana cara mengajarkannya melalui desain pembelajaran yang telah disusun. Oleh karena itu kualitas mata kuliah P3PPKn perlu untuk ditingkatkan dalam menyiapkan pendidik profesional sesuai tantangan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Pendidikan kewarganegaraan, P3PPKn, Sekolah Dasar, moral, karakter



PENDAHULUAN

Menurut undang-undang sistem pendidikan nasional, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan oleh seluruh peserta didik di seluruh jenjang pendidikan formal (Magdalena, 2020). Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat sekolah dasar (SD) adalah kendaraan utama untuk mencapai keterampilan peserta didik dalam aspek menjadi warga negara yang baik dan berpartisipasi sebagai warga sipil (Hidayah, 2019). Sebagai calon guru SD yang sedang menempuh pendidikan, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) harus memahami konsep dasar PPKn, agar sukses dalam memberikan ilmunya pada peserta didik.

Pendidikan Kewarganegaraan di SD mencakup beberapa hal yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuannya adalah untuk mencapai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Parawangsa 2021). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menanamkan nilai, moral, dan norma pada peserta didik yang dijadikan pondasi dalam menjalankan kegiatannya sebagai warga negara dan ikut serta dalam pembangunan nasional maupun global (Irianto, 2020).

Pada tingkat SD, PPKn berfungsi membentuk peserta didik sedini mungkin menjadi masyarakat yang menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-harinya (Dewi, 2021). Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 ruang lingkup PPKn terdiri dari beberapa aspek, yaitu: persatuan dan kesatuan bangsa; norma, hukum, dan peraturan; hak asasi manusia; kebutuhan warga negara; konstitusi negara; kekuasaan dan politik; Pancasila; dan globalisasi (Parawangsa, 2021). Ruang lingkup mata pelajaran ini harus dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik abad-21 yang dipersiapkan untuk menjadi warga negara global yang ikut berperan aktif dalam perkembangan dan kemajuan dunia.

Karakteristik yang harus dimiliki oleh PPKn terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan (Zuriah, 2022). Ketiga aspek tersebut harus dimiliki oleh warga negara untuk dapat hidup berbangsa dan bernegara yang baik. Seorang calon guru yang sedang menempuh Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) harus mengetahui konsep dasar PPKn melalui mata kuliah Pengembangan dan Praktik Pembelajaran PPKn (P3PPKn).

Mata kuliah P3PPKn ini membekali mahasiswa PGSD untuk mengembangkan kompetensi pedagogik (Amroellah, 2018). Dalam hal ini dimensi yang dimaksud adalah nilai karakter yang sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sejalan dengan hal tersebut Judiani mengungkapkan bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu; kompetensi pendidik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Judiani, 2011).

Model pembelajaran lainnya yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu dengan pendekatan kooperatif (Mahmud, 2017), model scramble (Choerifki, 2017) dan model VCT (Astawa, 2020). Dari penelitian sebelumnya ini

masih belum banyak yang secara khusus mendeskripsikan pemahaman dan urgensi mata kuliah P3PPKn di tingkat SD. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perbaikan praktek pembelajaran P3PPKn SD di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menampilkan bukti atau fakta berupa uraian dalam kata dan kalimat (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan subjek penelitian mahasiswa PGSD FKIP Universitas Ahmad Dahlan semester IV. Hal ini disebabkan karena mahasiswa pada tingkat ini mendapatkan pemahaman mendasar terkait dengan konsep PPKn. Proses yang dilakukan adalah dengan membagikan kuesioner berisikan pertanyaan tentang pemahaman dan urgensi konsep PPKn di tingkat SD. Metode pengumpulan data adalah melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menerapkan beberapa sintaks kegiatan, diantaranya: pengumpulan, reduksi, penyajian dan penyimpulan data (Miles & Huberman, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada 42 responden mahasiswa, mereka mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang penting karena dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 95,2% diantaranya menyatakan sangat setuju dan 4,8% menyatakan setuju. Materi yang diberikan pada PKn seperti: sikap toleransi, rasa cinta tanah air, kerjasama, tolong-menolong, menghormati, saling menghargai, kesadaran berkonstitusi UUD RI 1945 dan semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan materi yang penting untuk dipelajari oleh siswa SD. Sifat PKn yang multidimensional sangat dibutuhkan dalam menyiapkan warga negara yang berpartisipasi membangun bangsa (Parawangsa, 2021). Salah seorang responden mengakui pentingnya mempelajari PKn: *"PKn menjadikan masyarakat memiliki wawasan kenegaraan yang patuh dan menjalankan perintahnya, melakukan hak dan kewajiban, ikut berpartisipasi dalam politik"* (WT, 20 thn).

Mata kuliah P3PPKn juga dapat membantu calon pendidik dalam memahami hak dan kewajibannya. Hal ini terlihat sebanyak 76,2 % menyatakan sangat setuju dan 23,8 % menyatakan setuju terhadap hal ini. PKn dilihat tidak hanya sebatas pendidikan di tingkat formal saja, namun juga mencakup partisipasi aktif dan bertanggung jawab warga negara.

Salah seorang responden menyatakan: *"Pelajaran P3PPKn dapat memudahkan saya dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk diajarkan ke peserta didik. Mata kuliah ini membantu saya memahami hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara dengan lebih jelas sebelum diajarkan kepada peserta didik. Sebaiknya kita sendiri dulu harus mengetahuinya agar saat peserta didik bertanya kita sebagai pendidik bisa menjawabnya dengan baik"*. (TM, 20 thn).

Responden menyadari sebagai calon pendidik mereka membutuhkan keterampilan dalam menciptakan harmonisasi antara hak dan kewajiban agar dapat menjadi *role model* bagi muridnya. Hal ini disebabkan karena pembentukan moral dan kepribadian siswa sangat dipengaruhi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil survey terhadap responden, sebanyak 73,8 % menyatakan sangat setuju dan 26,2 % menyatakan setuju terkait dengan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sebagai materi yang harus diajarkan kepada peserta didik. Pancasila merupakan pondasi negara Indonesia. Nilai-nilai di setiap silanya teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ciri khas bangsa Indonesia (Safitri, 2021). Murid SD harus dibekali pentingnya belajar Pancasila sebagai kontrak sosial dan etika kehidupan bangsa. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar cinta tanah air, mampu bermasyarakat dan menumbuhkan sikap solidaritas (Hidayah, 2019).

Sebanyak 59,9% mahasiswa PGSD menilai tidak setuju bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang membosankan. Alasan yang diungkapkan oleh salah seorang responden: "*dengan praktik dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran menjadi tidak membosankan, sebagai contoh kecil saja pada materi PPKn diajarkan hak dan kewajiban, saling menghargai satu sama lain, memahami perbedaan, hingga peraturan-peraturan negara yang diterapkan dalam keluarga, masyarakat, dan bernegara.*" (TN, 20 thn).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki karakter uniknya tersendiri dan didasarkan pada bidang studi yang mendorong kolaborasi guru dan siswa selama proses pembelajaran (Martini, 2020). Dalam praktik nyata, hal itu sesuai dengan standar hidup normatif dan berlangsung dalam suasana demokratis (Winataputra, 2007). Untuk melaksanakan tugas ini, diperlukan kerjasama antara komunitas sekolah, siswa, dan masyarakat umum, termasuk pemerintah. Sekolah merupakan lingkungan yang paling berpengaruh dalam pengembangan pengetahuan, kompetensi, dan kepribadian (Civitas, 1998). Fakta yang terjadi di lapangan masih terdapat kekerasan, pelanggaran hukum, korupsi, kolusi dan nepotisme serta kecurangan lain yang dapat merugikan masyarakat. Nilai merupakan faktor yang terintegrasi dalam kepribadian, masyarakat dan budaya. Nilai tidak hanya diajarkan, namun lebih dari itu harus diinternalisasi dan diaktualisasikan dalam diri seseorang sebagai kualitas pribadi melalui proses belajar.

Pembelajaran PPKn seharusnya menggunakan metode belajar yang tidak hanya ceramah, namun bisa digabungkan dengan diskusi, *brainstorming* dan penugasan. Selain itu juga bisa menggunakan media pembelajaran yang melibatkan keterampilan peserta didik. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran PPKn yang bermuara kepada pendidikan nilai bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban. Sekolah berfungsi sebagai wahana psikopedagogis dan sosiopedagogis yang menjadi penting dimana saat peserta didik tidak mendapatkan pendidikan moral di keluarga maupun lembaga keagamaan (Winataputra, 2007).

Domain moralitas yang terdiri dari: *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral action* menjadi satu kesatuan yang substansif dan fungsional (Lickona, 1992). Model pendidikan yang difokuskan pada pengembangan pendidikan pribadi, sosial, dan politik di antara warga negara disebut model sinopsis. Model ini merupakan operasional nilai pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan, memahami, mengamalkan, dan melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya (Winataputra, 2007).

Sumber belajar yang sejalan dengan karakter peserta didik sangat diperlukan. Melihat hal tersebut, pendidik harus menyusun kerangka acuan PPKn yang terdiri dari: kandungan formal, informal, respons peserta didik pada kandungan formal dan

informal serta asintesis kebutuhan pribadi, masyarakat, dan negara (Hanh, 1998). Sehingga tujuan PKn di tingkat SD yaitu: partisipasi warga negara sejak dini dapat tercapai.

Pemahaman Konsep melalui Mata Kuliah P3PPKn SD

Mata kuliah P3PPKn berisi tentang identifikasi materi pembelajaran PPKn di kelas bawah dan tinggi yang sejalan dengan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan materi secara komprehensif (Asnita, 2020). Berdasarkan hasil survey terhadap 42 responden mahasiswa, mereka mengungkapkan 73,8 % sangat setuju mempelajari konsep dasar PPKn SD.

Hal ini bertujuan agar generasi selanjutnya tidak kehilangan jati diri serta membekali mereka dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembelajaran PKn merupakan wahana pendidikan dan karakter bangsa dilakukan dengan implementasi secara kontekstual (Rahim, 2020). Selain itu, diperlukan kompetensi profesional bagi calon pendidik dimana penguasaan materi tidak hanya sebatas pemahaman materi yang diajarkan, namun juga penguasaan berdasarkan kurikulum, konsep, struktur keilmuan, dan wawasan materi secara lebih luas lagi (Sukmawati, 2019).

Salah seorang responden menyatakan: *"Dengan mengetahui konsep dasar ini harapannya kita sebagai calon pendidik dapat memahami secara mendalam hal apa saja yang harus diajarkan sesuai dengan acuan yang ada dan dapat membagikan ilmunya kepada anak didik dengan baik dan benar."* (SF, 19 thn).

Sesuai dengan kurikulum 2013, nama mata pelajaran PKn berubah menjadi PPKn. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Kompetensi inti dan kompetensi dasar berisi muatan nilai moral Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, perlu adanya pemberdayaan dan karakterisasi seluruh anggota masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera.

Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah P3PPKn mencakup: konsep dasar PPKn, sejarah perkembangan PPKn, hak dan kewajiban, Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika, persatuan dan kesatuan, karakter, moral dan sikap yang diimplementasikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Materi ini sudah sejalan dengan kurikulum 2013.

Berdasarkan materi yang diajarkan ini, paradigma kurikulum 2013 saat ini memasuki tahap implementasi meluas. Konsepsi tersebut menunjukkan adanya integrasi yang menjembatani pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) baik Kompetensi Inti (KI) dan dikembangkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Mata kuliah P3PPKn juga meliputi perencanaan, strategi, media, sumber belajar, dan evaluasi. Mahasiswa dapat mengembangkan dan menyesuaikan dengan karakter peserta didik.

Mahasiswa P3PPKn diharapkan dapat mengidentifikasi, merancang, mengembangkan dan mengevaluasi penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal tersebut dilakukan mulai dari pemetaan dan menganalisis kompetensi dasar dan kompetensi inti, menyusun indikator, membuat tujuan pembelajaran, instrumen penilaian, soal latihan dan evaluasi serta mempraktikkan kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan RPP.

RPP disusun secara sistematis agar proses pembelajaran dapat bersifat interaktif, menyenangkan sehingga siswa ingin berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pada mata pelajaran PKn perlu keterlibatan peserta didik dalam menyelami materi demi materi yang ada. RPP mata pelajaran PPKn SD harus dapat memperlihatkan pemetaan tema dan subtema KI 1 dan K2 untuk kemudian dituangkan dalam KD dan indikator. Untuk mendorong itu semua perlu model pembelajaran yang mampu mewadahi dalam menghasilkan karya yang kontekstual dengan model pembelajaran berbasis masalah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terlihat bahwa mahasiswa PGSD FKIP UAD mayoritas memahami konsep dasar PPKn di tingkat SD. Mereka juga menyadari sebagai calon pendidik perlu berinovasi dalam proses pembelajarannya melalui desain pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dilakukan dengan memilih strategi, model dan metode sesuai dengan karakteristik materi. Tekad ini tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak baik sekolah, orang tua maupun masyarakat. Pemahaman materi PKn yang komprehensif oleh calon pendidik memberikan pengaruh besar dalam upaya menyampaikan pengetahuan, melatih keterampilan dan membentuk watak kewarganegaraan sejak usia dini.

REFERENSI

- Amroellah, A., Suarmika, P. E., & Utama, E. G. (2018). Analisis Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Muatan Pelajaran PPKn di Kecamatan Situbondo. *JPDI (Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia)*, 3(2), 36-39.
- Asnita, A. (2020). Pengembangan Bahan Ajar PKn Berbasis Neurosains Pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Pedagogik Journal of Islamic Elementary School*, 3(1), 89-104. <https://doi.org/10.24256/pijies.v3i1.1262>.
- Astawa, I. W., Putra, M., & Abadi, I. . G. S., I. S. (2020). Pembelajaran PPKn dengan Model VCT Bermuatan Nilai Karakter Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Siswa . *JP2*, 3(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JP2/article/viewFile/25677/15584> .
- Civitas Internasional. (1998). *International Partnership for Civic Awareness Conference Report*, Strasbourg: Civitas Inernasional.
- Choerifki, S. (2018). Peningkatan Hasil Belajar PKn Melalui Model Pembelajaran Scramble. *Basic Education*, 7(15), 1-491.
- Dewi, R. R., Suresman, E., & Suabuana, C. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter di Persekolahan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(1), 71-84.
- Hanh, C.L. (1998). *Becoming Political: Comparative Perspectives on Citizenship Education*, New York: State University of New York Press.
- Hidayah, Y., Trihastuti, M., & Dewie, D. A. (2019). Kecerdasan Berideologi Calon Guru Pendidikan Sekolah Dasar Melalui Pendidikan Pancasila. <https://journal.stai-alfurqan.ac.id/alqiyam/index.php/alqiyam/>.

- Irianto, A. (2020). Pendekatan Pembelajaran Analisis Nilai Pada Mata Kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.36456/inventa.4.1.a2055>
- Judiani Setditjen Pendidikan Dasar, S. (2011). Kreativitas Dan Kompetensi Guru Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* (Vol. 17, Issue 1).
- Lickona, T. (1992). *Educating of Character: How our Schools can Teach Respect and Responsibility*, New York; Bantam Books.
- Mahmud, A. R., & Saneba, B. Jamaludin.(2017). Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran PKn Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Kelas IV SD Inpres Koyoan. *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, 5(1), 44-52.
- Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2(3), 418–430.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Martini, E., Komalasari, K., Budimansyah, D., & Winataputra, U. S. (2020). Citizenship Competence Era of the Industrial Revolution 4.0 Vocational Education. <https://www.moe.gov.sg/education/education-system/21st->
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Parawangsa, E., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8050–8054.
- Permendikbud. No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- Rahim, A., Raya, J., Km, B., & Timur, C. J. (2020). Penerapan Metode Role Playing pada Mata Pelajaran PPKn di Sekolah Dasar STKIP Kusuma Negara Jakarta. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 210–217.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94.
- Sukmawati, S., & Nensia, N. (2019). The role of Google Classroom in ELT. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(2), 142-145.
- Winataputra, Udin S. (2012). *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budimansyah. (2007) *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung : UPI
- Zuriah, N., & Sunaryo, H. (2022). Kontruksi Profil Pelajar Pancasila dalam Buku Panduan Guru PPKn di Sekolah Dasar. *Jurnal Civic Hukum*, 7(1), 71–87.